



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PARIWISATA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode 2 (dua) tahun (2025 s/d 2026).

2. Rencana ...

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.

11. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
13. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende
22. Bupati adalah Bupati Ende

23. Dewan ...

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada Dinas Pariwisata baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata adalah:
 - a. Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Pariwisata dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende;
 - b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Pariwisata sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
 - c. Memberikan pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan;
 - d. Mewujudkan infrastruktur bidang Pariwisata yang handal dan berkelanjutan dalam bingkai masyarakat Kabupaten Ende Bangkit Menuju Sejahtera;
 - e. Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dengan pelaku yang berbasis Dinas Pariwisata.

BAB IV ...

BAB IV RENSTRA DINAS PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pariwisata yang berpedoman pada RPD Tahun 2025- 2026.
- (2) Sistematika Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup

Pasal 6

Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata melibatkan semua personil aparatur Dinas Pariwisata dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pariwisata selama 2 (dua) tahun.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pariwisata menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Pariwisata kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Pariwisata.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pariwisata melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Kebijakan perencanaan
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.

(2) Pemantauan ...

- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Pariwisata meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Sub koordinator substansi program, Evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pariwisata melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Pariwisata; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing Bidang dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Pariwisata.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 13

- (1) Renstra Dinas Pariwisata dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rensra Dinas Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


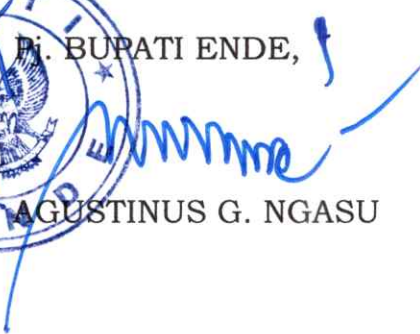
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap


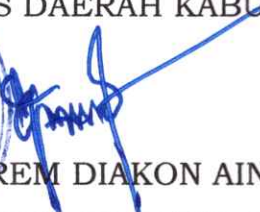
orang ...

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2024


Pi. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 Agustus 2024


Pi. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 dan telah berakhirnya RENSTRA Kabupaten Ende serta telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, maka disusunlah Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Ende merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa yang menempatkan keanekaragaman dalam segala aspek dan integritas nasional sebagai basis pengembangan kepariwisataan di masa yang akan datang. Pariwisata juga mempunyai peran penting terkait dengan perluasan lapangan kerja, penciptaan mata rantai perekonomian, peningkatan harkat dan martabat masyarakat, perluasan wawasan dan interaksi sosial manusia, perlindungan dan pemanfaatan alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun 2025-2026 ini, merupakan upaya menyelaraskan arah dan kebijakan pembangunan bidang Pariwisata dengan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ende dua tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2026.

Diharapkan Rencana Strategis Pariwisata dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparat dan seluruh stakeholder pariwisata sebagai pengejawantahan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Ende. Akhir kata, semoga Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2025 - 2026 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun dalam konteks evaluasi kinerja.

Ende, 2024
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Ende,

Mohamad Sahab HS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700407 199003 1 007

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	
2.1.1 Tugas	6
2.1.2 Fungsi	7
2.1.3 Struktur	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	8
2.2.1 Sumber Daya Manusia	8
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)	10
2.2.3 Potensi Daya Tarik Wisata, SDM dan Amenitas Pariwisata	12
2.2.4 Sumber Anggaran	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	22
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	22
2.5.1 Tantangan	21
2.5.2 Peluang	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE	24
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata kabupaten Ende	24
3.2 Visi Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25
3.2.1 Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024	25
3.2.2 Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25
3.3 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025	27
3.3.1 Visi	27
3.3.2 Misi	28
3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026	28
3.5 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025	29
3.6 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende 2025-2026	30
3.7 Keterkaitan Visi dan Misi Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi NTT, RPD Kabupaten Ende 2025-2026, Dan RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	35
3.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	36
3.3 Isu-isu Strategis	37
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran	42
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA	57
BAB VIII PENUTUP	58
8.1 Pedoman Transisi	58
8.2 Kaidah Pelaksanaan	58

B. DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah PNS Dinas Pariwisata Berdasarkan Golongan Tahun 2023	
2.2 Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Pariwisata Tahun 2023	9
2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Eselon, Latar Belakang Pendidikan dan Jabatan Fungsional Tahun 2023	9
2.4 Data Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	10
2.5 Data Potensi Wista Tahun 2023	12
2.6 Data Sertifikasi Profesi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif s.d Tahun 2023	12
2.7 Data Biro/Agen Perjalanan Wisata Tahun 2023	12
2.8 Data Angkutan Wisata Tahun 2023	13
2.9 Data Akomodasi/Pengianapan menurut Kecamatan Tahun 2023	13
2.10 Data Restoran dan Rumah Makan Menurut Kecamatan Tahun 2023	13
2.11 Data Desa Wisata di Kabupaten Ende s.d Tahun 2023	14
2.12 Data Kalender Event Kabupaten Ende Tahun 2023	16
2.13 Data Kelompok Sadara Wisata (POKDARWIS) s.d Tahun 2023	17
2.14 Pusat Informasi Pariwisata (TIC- <i>Tourist Information Center</i>)	17
2.15 Data Usaha Ekonomi Kreatif Menurut Kecamatan s.d Tahun 2023	17
2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Penyesuaian Renstra Tahun 2019-2024	19
2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Renstra Tahun 2019-2024 Sebelum Penyesuaian Data Aset/Potensi Pariwisata Kabupaten Ende	20
3.1 RENSTRA Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode Tahun 2020-2024	26
3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026	28
3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	31
3.4 Keterkaitan Visi dan Misi Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi NTT, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende 2025-2026 dan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	35
3.5 Matrik Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	40
4.1 Target Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	42
4.2 Hubungan Tujuan, Sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	43
5.1 Arah Kebijakan	44
6.1 Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	46
7.1 Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 53 daerah otonom yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada Tahun 2024. Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Ende juga berakhir di tahun yang sama. Pada masa transisi pemimpin daerah definitif, kekosongan kepala daerah diisi dengan penjabat bupati. Penjabat bupati tentunya membutuhkan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.

Rencana Pembangunan Daerah transisi sebagai pedoman bagi penjabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik sekaligus menjadi dasar bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun Renstra transisi 2025-2026.

Renstra 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025—2026 ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ende Periode 2025—2026 dan penjabaran terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025—2026.

Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan lingkungan strategis, berbagai kendala serta masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende terutama yang menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra ini berpedoman pada RPD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata sebagai representasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari pembentukan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ende 2025-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri ENomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Ende Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende) Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Ende Nomor 55 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
19. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Transisi Dinas Pariwisata Tahun 2025-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kurun waktu dua tahun sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Transisi Dinas Pariwisata Tahun 2025-2026 adalah:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Pariwisata dalam mendukung tujuan dan sasaran Rencana Program Daerah (RPD) Kabupaten Ende.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RENSTRA dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan sektor Pariwisata sehingga dapat merumuskan indikator sasaran dan strategi penyelesaian secara tepat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Transisi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu ditindaklanjuti melalui RENSTRA Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,
1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

2. Isu Strategis memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, maka tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. Pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Pengelolaan pengembangan industri pariwisata;
- e. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- f. Pengelolaan pengembangan kapasitas dan kelembagaan;
- g. Pemberian fasilitasi bidang pariwisata;
- h. Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pariwisata;
- i. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
- j. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
- k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Kepala Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- m. Pelaksanaan kerjasama bidang pariwisata dengan Pemerintah maupun Swasta di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

2.1.1 Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 55 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, maka tugas Dinas Pariwisata adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pariwisata.

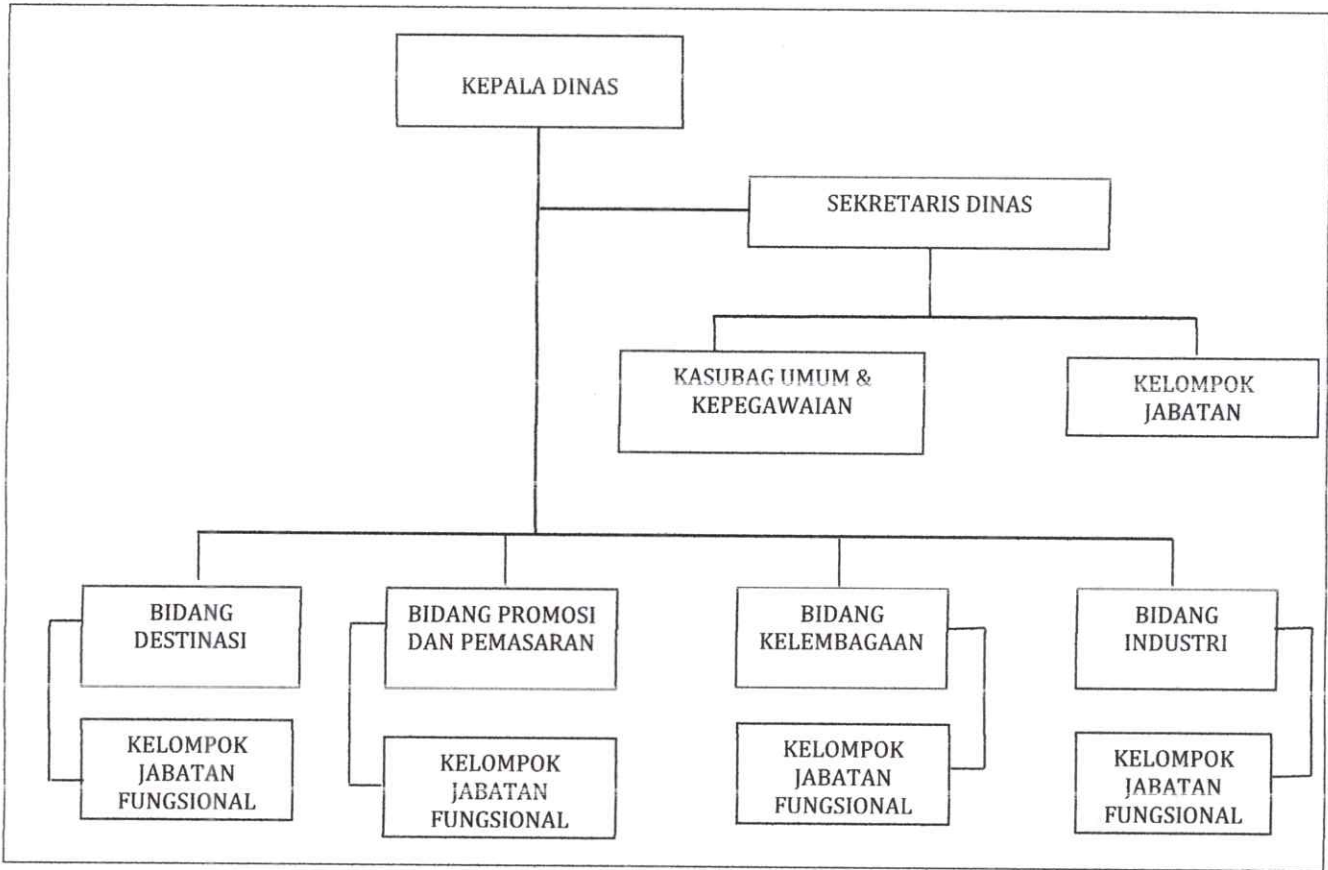
2.1.2 Fungsi

- a. Memvalidasi perumusan program dan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- c. Menetapkan kebijakan teknis tentang pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang destinasi, promosi dan pemasaran, industri serta kelembagaan pariwisata;
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan pihak lain dalam rangka pengembangan pariwisata;
- e. Menetapkan kebijakan pelaksanaan kerjasama bidang pariwisata dengan lembaga dan organisasi;
- f. Pemberian rekomendasi, perizinan, asistensi, konsultasi dan supervisi kepada instansi atau pihak lain dalam penyelenggaraan bidang pariwisata;
- g. Menetapkan kebijakan tentang bagaimana memfasilitasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan program pariwisata;
- h. Mengkoordinasi pelaksanaan identifikasi masalah-masalah strategis untuk menjamin kesinambungan aktivitas kepariwisataan;

2.1.3 Struktur

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah
3. Bidang Destinasi, terdiri dari:
 - a. Jafung Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Jafung Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
5. Bidang Industri, terdiri dari :
 - a. Jafung Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
6. Bidang Kelembagaan, terdiri dari:
 - a. Jafung Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende



2.2 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan roda pembangunan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende didukung oleh 27 orang aparatur yaitu 25 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jumlah PNS berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah PNS Dinas Pariwisata berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	5
2	III	19
3	II	1
4	X (PPPK)	2
	JUMLAH	27

Tabel 2.1 menggambarkan bahwa jumlah aparatur PNS yang ada di Dinas Pariwisata didominasi oleh golongan III sebanyak 19 orang (70,37%), golongan IV sebanyak 5 orang (18,52%), golongan II sebanyak 1 orang (3,70%) dan golongan X (PPPK) sebanyak 2 orang (7,41%).

(18,52%), golongan II sebanyak 1 orang (3,70%) dan golongan X (PPPK) sebanyak 2 orang (7,41%).

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir
Dinas Pariwisata Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SMU/SMK	2
2	SARJANA MUDA	4
3	SARJANA	22
4	STRATA II	1
	JUMLAH	27

Tabel 2.2 menggambarkan bahwa jumlah aparatur yang berpendidikan sarjana sebanyak 22 orang (81,48%), Sarjana Muda 4 orang (14,81%), SMU/SMK sebanyak 2 orang (7,41%).

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Eselon, Latar Belakang Pendidikan dan Jabatan Fungsional Tahun 2023

NO	ESELON	JUMLAH (Orang)										TOTAL
		Strata II	Sarjana Umum	Sarjana Ekonomi	Sarjana Sosial	Sarjana Sastra Inggris	Sarjana Pariwisata	Sarjana Sains	Sarjana Teknik	Sarjana Muda	SMA	
1	II	-	1	-	-	-	-		-	-	-	1
2	III	1	2	1	-	-	1		-	-	-	5
3	IV	-	-	-	-	1	-		-	-	-	1
4	FUNGSIONAL UMUM/STAF			3	2	2	3	1	3	4	2	20
	TOTAL	1	3	4	2	3	4	1	3	4	2	27

Tabel 2.3 menggambarkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan golongan dan tingkatan pendidikan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dapat memenuhi amanat UU kepegawaian No. 43 Tahun 1999 tentang persyaratan dalam pengisian jabatan pada suatu lembaga pemerintahan satuan kerja perangkat daerah.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata Kabupaten Ende didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi:

Tabel 2.4
Data Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah	6 bidang	6			Kantor Dinas Pariwisata, Moni, Detusoko, Pantai Ria/Kotaraja, Gedung Kesenian di Kec Wewaria, Gedung Kesenian di Kec Pulau Ende,
2.	Mobil Dinas	1	1			
3.	Sepeda Motor	8	8			
4.	GPS	1	1			
5.	Rak Penyimpanan	16			16	
6.	Mesin Ketik Manual	5			5	
7.	Filling Cabinet	2	1		1	
8.	Lemari	5	1		4	
9.	Papan Nama Instansi	2	2			
10.	Papan Pengumuman/Petunjuk /informasi	4	2		2	
11.	Whiteboard	3	3			
12.	Meja kayu	23	17		6	
13.	Kursi kayu	24	18		6	
14.	Meja ½ biro	8	8			
15.	Sofa	4	2		2	
16.	Mesin potong rumput	2	2			
17.	Kipas angin	3	3			
18.	TV	2	1		1	
19.	Wireless	4	1		3	
20.	Kamera	7	3		4	
21.	Handycam	3	1		2	
22.	Komputer (PC Unit)	2	1	1		
23.	Mobile computer/ Laptop	4	3		1	
24.	Notebook	4	4			
25.	Printer	12	4	3	5	
26.	Finger Scanner	1	1		1	
27.	Meja Kerja Staf	17	16		1	
28.	Meja Maket	1	1			

29.	Drone	1	1			
30.	Meja dan kursi set	Meja 20 kursi 120	1			
31.	Hikers Hut/Shelter		1			Kec. Detusoko
32.	Gedung TIC		1			Sao Ria Moni
33.	Bangunan Tempat Parkir		1			Kawasan Wisata Bahari Pantai Kota Raja
34.	Bangunan Tempat Parkir		1			Kawasan Sao Ria Wisata Moni
35.	Gedung Rekreasi Permanen	Tempat Semi	1			Detusoko
36.	Panggung Hiburan		1			Kecamatan Ende Utara
37.	Stand Kuliner Pantai Ria		1			Jln.Bhakti,Kec.Ende Utara
38.	WC, Ruang Ganti, Gazebo		1			Desa Tonggopapa Kec. Ende
39.	Lobby Sao Ria		1			Desa Koanara moni kecamatan kelimutu
40.	Gazebo di kolam Air Panas		1			Detusoko
41.	Jalur Pejalan Kaki Wisata Bahari Kota Raja		1			Kawasan Wisata Bahari Pantai Kota Raja
42.	KM/WC Umum Pantai Ria		1			Kawasan Wisata Bahari Pantai Kota Raja
43.	Toilet Taman Rendo		1			Kawasan Wisata Bahari Pantai Kota Raja
44.	Kios Cenderamata/TIC Ende		1			Jl Soekarno
45.	Kursi Makan berbahan Kayu		1			Kawasan Wisata Bahari Pantai Kota Raja
46.	Digital Keyboard Technics		1			
47.	Camera Digital					
48.	Printer (Peralatan Personal Komputer)		1			
49.	Papan Pengumuman		1			
50.	Laptop		2			
51.	Tripod Camera		1			
52.	Layar Film/Projector		1			
53.	Digital Sign		1			
54.	Smart TV		1			
55.	Sound System outdoor		1			
56.	Sound System Indoor		1			

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Ende, 2023

2.2.3 POTENSI DAYA TARIK WISATA, SDM DAN AMENITAS PARIWISATA

Kabupaten Ende juga memiliki aset/potensi pariwisata yang tersebar hampir di seluruh wilayah dengan karakteristik yang naturalis. Adapun data potensi pariwisata tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Data Potensi Wisata Tahun 2023

NO.	ASET POTENSI PARIWISATA KABUPATEN ENDE	JUMLAH
1.	Wisata Alam	64
2.	Wisata Budaya	31
3.	Wisata Minat Khusus	5
4.	Wisata Sejarah	8
	JUMLAH	108

Tabel 2.6
Data Sertifikasi Profesi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif s.d Tahun 2023

NO.	JENIS KOMPETENSI	TAHUN SERTIFIKASI	JUMLAH
1.	Room Attendant	THN. 2018, 2019. 2020	12
2.	Front Office	THN. 2018, 2019. 2020	15
3.	Waiter	THN. 2018, 2019. 2020	17
4.	Accounting	THN. 2019	1
5.	Supervisor Resto	THN. 2019	1
6.	Maintenance	THN. 2020	2
7.	House Keeping	THN 2018, 2019, 2020	10
8.	Gardener	THN. 2019	3
9.	Security	THN. 2019	4
10.	Driver	THN. 2019	1
11.	Guide	THN. 2018	5
12.	Penyanyi Solo	THN. 2022	17
13.	Musisi	THN. 2022	27
	JUMLAH		115

Tabel 2.7
Data Biro/Agen Perjalanan Wisata Tahun 2023

No.	NAMA USAHA	Jenis Usaha (APW/ BPW)	ALAMAT	NOMOR TDUP
1.	PT. Kelimutu Citra Mandiri	APW	Jl. Gatot Subroto	-
2.	Roland Tour and Travel	APW	Jl. Ahmad Yani	KPPTSP.503/PK/03 / XII/2011
3.	PT. Merdeka Multi Sarana Travel	APW	Jl. Kelimutu	DPMPSTP.570/ TDUP/04/V/2023
4.	PT. Angkasa Travel	APW	Jl. Kelimutu	-

Tabel 2.8
Data Angkutan Wisata Tahun 2023

NO.	ANGKUTAN WISATA	ALAMAT
1.	Ecolodge Travel	Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu
2.	Bintang Travel	Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu
3.	Palm Travel	Desa Woloara, Kecamatan Kelimutu
4.	Kelimutu Paradise Travel	Desa Woloara Barat, Kecamatan Kelimutu
5.	Century Travel	Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu

Tabel 2.9
Data Akomodasi/Penginapan menurut Kecamatan Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	HOTEL / LOSMEN	HOMESTAY	JML KAMAR
1.	Nangapanda	-		
2.	Pulau Ende	-		
3.	Maukaro	-		
4.	Ende	-		
5.	Ende Selatan	3	-	29
6.	Ende Utara	3	2	59
7.	Ende Tengah	11	2	264
8.	Ende Timur	8	1	147
9.	Ndona	1	-	9
10.	Ndona Timur	-		
11.	Woiwaru	-		
12.	Wolojita	-		
13.	Ndori	-		
14.	Lio Timur	-		
15.	Kelimutu	3	73	229
16.	Kelisoke Lepembusu	-		
17.	Detusoko	-	13	35
18.	Maurole	-		
19.	Wewaria	-		
20.	Detukeli	-		
21.	Kotabaru	-		
	JUMLAH	29	91	772

Tabel 2.10
Data Restoran dan Rumah Makan Menurut Kecamatan Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	RESTORAN	RUMAH MAKAN	CAFE
1.	Nangapanda		1	
2.	Pulau Ende			
3.	Maukaro			
4.	Ende			2
5.	Ende Selatan		12	

6.	Ende Utara	2	15	10
7.	Ende Tengah	2	24	1
8.	Ende Timur		24	4
9.	Ndona		1	2
10.	Ndona Timur			
11.	Wolowaru		9	1
12.	Wolojita			
13.	Ndori			
14.	Lio Timur			
15.	Kelimutu	1	3	10
16.	Kelisoke Lepembusu			
17.	Detusoko		2	2
18.	Maurole			
19.	Wewaria			
20.	Detukeli			
21.	Kotabaru			
	JUMLAH	5	91	32

Tabel 2.11 Data Desa Wisata di Kabupaten Ende s.d Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	NAMA DESA WISATA		SK DESA WISATA	POTENSI DESA	KATEGORI		
							Mandiri	Berke mbang	Embrio
1.	Kelimutu	Desa Koanara	1.	Moni	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK /2020	Air terjun Murundao, kampung adat Koanara, Kampung Adat Watugana	✓		
		Desa Pemo	2	Pemo	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK /2020	Danau Kelimutu, Kampung adat Pemo		✓	
		Desa Waturaka	3	Waturaka	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK /2020			✓	
		Desa Woloara	4	Woloara	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK /2020			✓	
		Desa Woloara Barat	5	Woloara Barat	-				✓
2.	Detusoko	Kelurahan Detusoko	6	Detusoko	-	Kolam Air Panas, Gua Maria, Bangunan Gereja tua, sawah bertingkat			✓
		Desa Detusoko Barat	7	Detusoko Barat	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK /2020	Agro wisata,, sawah bertingkat		✓	
		Desa Wolotolo Tengah	8	Wolotolo Tengah	-	Kampung adat, belut		✓	
		Desa Wologai Tengah	9	Wologai Tengah	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK /2020	Kampung adat, camping ground, hutan adat, kolam pemancingan		✓	

		Desa Saga	10	Saga	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK /2020	Kampung adat, ritual adat "Nggua"		✓
		Desa Sipijena	11	Sipijena	Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor Par.754.4/26/II /2023	Kampung adat, ritual adat "Nggua", sawah bertingkat		✓
3.	Ndona	Desa Wolotopo Timur	12	Wolotopo	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par 754.4/10/VII/2021	Kampung adat, panorama pantai	✓	
		Kelurahan Onelako	13	Radaara	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II /2023	Kampung adat, proses pembuatan tenun ikat	✓	
		Desa Wolotopo	14	Wolotopo	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II /2023	Pantai Mbu'U, kampung adat, trekking, camping area, proses tenun ikat	✓	
4.	Wolajita	Desa Nggela	15	Nggela	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK /2020	Air Panas Ae Wau, air terjun Ae Bai'i, air terjun ae Wala, kampung adat, tarian mure, proses tenun ikat	✓	
5.	Ende Timur	Kelurahan Rewarangga	16	Rewarangga	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 756.8/10.a/VII/2021	Atraksi wisata sungai (river tubing) agro wisata, wisata rohani, wisata literasi, tenun ikat	✓	
6.	Detukeli	Desa Watunggere Marilonga	17	Watunggere	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 754.4/21/XII/2022	Benteng Marilonga, kampung adat		✓
7.	Ende	Desa Tonggopapa	18	-	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 754.4/26/II/2023	Air terjun Mbu'U		✓
8.	Nangapanda	Watumite	19	-	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 754.4/26/II/2023	Panorama, kampung adat, air terjun, trekking		✓
9.	Pulau Ende	Desa Paderape	20	-	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 754.4/26/II/2023	Bekas benteng peninggalan Portugis, Bukit Emburambotu, panorama pantai		✓
		Desa Redodori	21	-	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II /2023	View alam laut, pantai, mancing		✓

		Desa Rendoraterua	22	-	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II/2023	View alam laut, panorama pantai, mancing, pembuatan perahu/dayung/samp			✓
		Desa Rorurangga	23	-	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II/2023	View alam laut, panorama pantai, pembuatan perahu/dayung/samp			✓

Tabel 2.12 Data Kalender Event Kabupaten Ende Tahun 2023

NO.	NAMA EVENT	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Joka Ju	April	Kel. Wolojita, Kec. Wolojita	Komunitas adat	Ritual adat tolak bala
2.	Festival Pesona Kebangsaan	28 Mei – 01 Juni	Ende	Pemkab Ende, Jaringan Kota Tapak Soekarno (JAKET SOEKARNO)	Kegiatan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni
3.	Festival Kelimutu	11 – 14 Agustus	Ende dan Desa Pemo (Taman Nasional Kelimutu)	Komunitas adat Kelimutu, Pemkab Ende, Balai TN Kelimutu	Kegiatan budaya dalam rangka ritual adat Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata di Danau Kelimutu
4.	Nggua Wologai	September	Desa Wologai Tengah, Kec. Detusoko	Komunitas adat Wologai	Ritual adat ucapan permohonan keberhasilan panen
5.	Nggua Saga	September	Desa Saga, Kec. Detusoko	Komunitas adat Saga	Ritual adat ucapan permohonan keberhasilan panen
6.	Tedo Tembu Wesa Wela	Oktober	Desa Pemo, Kec. Kelimutu	Komunitas adat Pemo	Ritual adat ucapan permohonan keberhasilan panen
7.	Pesumba	Desember	Wolotopo, Kec. Ndona	Komunitas adat Wolotopo	Permainan tradisional
8.	Sewu Api	31 Desember – 01 Januari	Desa Mukusaki, Kec. Wewaria	Komunitas adat Mukusaki	Ritual tahunan untuk memohon kemakmuran

Tabel 2.13 Data Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) s.d Tahun 2023

No.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		NAMA POKDARWIS	NO. SK POKDARWIS
1	Kelimutu	1.	Desa Koanara	Koanara	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		2.	Desa Pemo	Pemo	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		3.	Desa Waturaka	Waturaka	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		4.	Desa Woloara	Woloara	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		5.	Desa Woloara Barat	Woloara Barat	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
2	Detusoko	6.	Desa Detusoko Barat	RMC	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		7.	Desa Wolotolo Tengah		Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		8.	Desa Wologai Tengah	Pu'U Tubu	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		9.	Desa Saga	-	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
3	Wolajita	11	Desa Nggela	Nggela Exotic	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
4	Ende Timur	12	Kelurahan Rewarangga	Rewarangga	Kep. Lurah Rewarangga No.05 / 2021
5	Ndona	10	Desa Wolotopo Timur	Besu Nusa	Kep. Kepala Desa Wolotopo Timur No.14 Tahun 2021
6	Detukeli	13	Desa Watunggere Marilonga	Watunggere	Kep. Kepala Desa Watunggere Marilonga No.6 Tahun 2023

Tabel 2.14 Pusat Informasi Pariwisata (TIC – Tourist Information Center)

NO.	TIC	Jam Operasional	LOKASI
1.	TIC Dinas Pariwisata	08.00 – 15.00 wit	Jl. Soekarno No. 4
2.	TIC Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende	08.00 – 16.00 wit	Ruang Kedatangan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende
3.	TIC Moni - Koanara	-	Kawasan Sao Ria WisataDesa Koanara, Kecamatan Kelimutu
4.	TIC Gunung Meja	-	Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan

Tabel 2.15 Data Usaha Ekonomi Kreatif Menurut Kecamatan s.d Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF
1.	Nangapanda	1	Kriya
2.	Pulau Ende	1	Musik
3.	Ende	1	Kriya, Musik
4.	Ende Selatan	3	Kriya, Musik, Kuliner
5.	Ende Utara	4	Kriya, Musik, Kuliner, Video dan Film
6.	Ende Tengah	18	Kriya, Musik, Kuliner, Design Grafis, Fashion, Seni Pertunjukan
7.	Ende Timur	9	Kriya, Musik, Kuliner, Design Grafis
8.	Ndona	12	Kriya, Musik, Kuliner
9.	Wolowaru	7	Kriya, Musik, Kuliner
10.	Wolajita	25	Kriya, Musik,
11.	Kelimutu	14	Kriya, Musik, Kuliner, Seni Pertunjukan,
12.	Detusoko	6	Kriya, Musik, Kuliner
13.	Maurole	1	Kriya, Musik
14.	Detukeli	3	Kriya, Musik
15.	Kotabaru	1	Kriya

2.2.4 Sumber Anggaran

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ende, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende didukung dana yang berasal dari APBD II dan DAK.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

Renstra Dinas Pariwisata mengalami penyesuaian pada Tahun 2022 sampai dengan 2024. Perubahan atau penyesuaian Renstra Dinas Pariwisata disebabkan oleh beberapa faktor yakni penyeselarasan arah kebijakan nasional RPJMN sampai dengan RPJMD, perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Pandemi Covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Ende. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui operasional gugus tugas, pencegahan dan penanganan kesehatan, penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Savety Net) serta pemulihan ekonomi.

Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata pada masa sebelum penyesuaian dan setelah adanya penyesuaian Renstra Periode 2019-2024 dapat diketahui dari data yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende
Renstra Tahun 2019-2024 Sebelum Penyesuaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Hasil Capaian %				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Ende	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	92.248	105.873	116.460	128.106	140.916	86.439	39.320	33.702			93,70	37,14	28,94		
2	Meningkatnya lama Tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1 hari	1,2 hari	1,4 hari	1,6 hari	1,8 hari	1 hari	1,2 hari	1,2 hari			100	100	85,71		
3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Penerimaan sektor pariwisata	%	10%	10 %	10%	10%	10%	15%	10,86 %	9,48%			150,00	108,60	95		

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 sebelum Penyesuaian mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis yakni Meningkatkan Kunjungan Wisatawan ke Ende, Meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan dan Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dengan masing-masing indikatornya. Sasaran Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Ke Ende capaian tertinggi pada Tahun 2019 yakni 93,70%, sedangkan capaian terendah berada pada Tahun 2021 yakni 28,94% atau menurun sebanyak 64,76%. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat besar hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid19. Terobosan Pemerintah Pusat bahkan Dunia untuk mengurangi penyebaran kasus Covid seperti larangan bepergian dan lockdown hampir di setiap daerah membatasi perjalanan orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini yang menjadi penyebab utama menurunnya jumlah kunjungan wisatawan sudah terlihat pada tahun sebelumnya yaitu 2020.

Untuk membangkitkan Kembali giat usaha pariwisata di masa Pandemi dan sebagai usaha untuk membantu Masyarakat yang terdampak langsung oleh Covid, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata berupa pelatihan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di beberapa Desa Wisata dengan tetap mengutamakan Protokol kesehatan dan CHSE.

Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende
Penyesuaian Renstra Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Renstra Tahun			Realisasi Renstra Tahun			Hasil Capaian		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Ende	Prosentase Jumlah Kenaikan Kunjungan	Orang	39.320 orang	37,15%	37,16%	37,17%	110,88 %	126,88 %		298,47 %	341,44 %	
2.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan (Length Of Stay)	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,2 hari	1,4 hari	1,6 hari	1,8 hari	1,48 hari	1,6 hari		105,71 %	100%	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Pariwisata	Nilai AKIP	C	B	B	B	B	B		100%	100%	

Tahun 2022 sampai dengan 2024 merupakan tahun sisa Renstra 2019-2024. Sejak Tahun 2022 Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Ende melampaui target yakni sebesar 298,47% atau sebanyak 101.875 orang dari target 48.309 orang. Tahun 2023 realisasi kunjungan wisatawan ke Ende sebanyak 122.360 orang dari target 53.931 orang, realiasi kinerja 126,88%. Lama tinggal wisatawan melampaui target yakni 105,71%. Tahun 2024 belum tersaji sebab penyusunan Renstra Transisi 2025-2026 dilaksanakan pada Tahun 2024. Sejak Tahun 2022, usaha di Bidang Pariwisata mulai bangkit setelah menurun secara drastis pada tahun-tahun sebelumnya. Usaha akomodasi dan makan minum adalah salah satu dari Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas pertumbuhan ekonomi agregat yakni sebesar 17,14%*. Pada Tahun 2022 Pendapatan dari sektor pariwisata dalam hal ini akomodasi dan rumah makan memberi kontribusi sebesar Rp19.923.000.000 di Tahun 2022. Pada Tahun 2021 pendapatan sebesar Rp16.633.700.000 atau 3,72 %. Kenaikan pertumbuhan usaha akomodasi dan makan minum sebanyak 13,42%.

** Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende dalam laporan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ende Menurut Usaha 2018-2022; hal 116*

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran adalah kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran layanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende meliputi:

1. Masyarakat umum dan Wisatawan Asing maupun Domestik; layanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata berupa informasi pariwisata;
2. Masyarakat pelaku usaha pariwisata baik perjalanan wisata, akomodasi dan transportasi wisata, layanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende yaitu pemberian izin usaha, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
3. Para pelaku usaha Ekonomi Kreatif; layanan fasilitasi peningkatan SDM pelaku usaha pariwisata, layanan pembinaan, pendampingan dan koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan expo pariwisata;
4. Para pelaku usaha kuliner di Kawasan obyek wisata Bahari Pantai Kota Raja;
5. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) layanan pembinaan dan koordinasi kegiatan usaha pariwisata;
6. Kelompok atau asosiasi pariwisata seperti Himpunan Perhotelan Indonesia Cabang Ende, ASITA layanan yang diberikan berupa koordinasi dan Kerjasama sebagai mitra pariwisata;
7. Perangkat Daerah, layanan administrasi, layanan informasi data pariwisata, koordinasi analisis dampak lingkungan, pelaksanaan berbagai kegiatan festival;
8. Kementrian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor UPBU Haji Hasan Aroeboesman Ende dalam hal ini Bandara H. Hasan Aeoroeboman Ende, layanan Kerjasama penyebaran informasi berupa penempatan Tourism Information Center sebagai sarana promosi pariwisata Kabupaten Ende.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

2.5.1 Tantangan

- ❖ Berkembang pesatnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di luar wilayah Kabupaten Ende sebagai pesaing/ kompetitor (terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur).
- ❖ Pengelolaan aneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Ende baik alam, sejarah, budaya maupun buatan sebagai daya saing dan daya banding perlu ditingkatkan kualitasnya (terstandarisasi).

- ❖ Tampilan seni budaya sebagai daya tarik wisata di seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Ende perlu ditingkatkan baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.
- ❖ Kesadaran wisata, penerapan/pemahaman Sapta Pesona dan kesiapan seluruh stakeholder pariwisata serta masyarakat Kabupaten Ende belum terealisasi secara maksimal.
- ❖ Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia kepariwisataan di Kabupaten Ende serta pendukung/penunjangnya masih kurang.
- ❖ Liberalisasi perdagangan/ pasar bebas dalam negeri dan pada Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang mengharuskan kepariwisataan di Kabupaten Ende punya daya saing tinggi dan berstandar.

2.5.2 Peluang

- ❖ Berkembangnya usaha pariwisata dunia, Indonesia, Nusa Tenggara Timur maupun di Kabupaten Ende yang kondusif dan menjanjikan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- ❖ Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kabupaten Ende baik alam, Sejarah, budaya maupun buatan yang khas/unik serta dapat berdaya saing dan daya banding yang tinggi dengan luar Kabupaten Ende.
- ❖ Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh stakeholder pariwisata dan masyarakat Kabupaten Ende yang ramah secara alamiah.
- ❖ Situasi keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Ende yang cukup kondusif.
- ❖ Berkembangnya produk-produk penunjang/pendukung kepariwisataan di Kabupaten Ende.
- ❖ Kredibilitas dan image calon wisatawan/wisatawan luar daerah maupun luar negeri terhadap kepariwisataan di Kabupaten Ende masih cukup tinggi.
- ❖ Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kabupaten Ende

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

Pemahaman terhadap kondisi permasalahan serta isu-isu strategis dalam pembangunan sangat dibutuhkan agar tujuan penyelenggaraan pembangunan dapat dicapai secara maksimal. Isu strategis yang dimaksud adalah hal-hal yang memiliki karakteristik penting, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menjadi penentu pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

Dinas Pariwisata Kabupaten Ende merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana tugas dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor pariwisata. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, antara lain:

1. Jumlah kunjungan wisata, domestik dan mancanegara masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh:
 - a. Pandemi Covid 2020 menyebabkan jumlah kunjungan menurun sejak Tahun 2020.
 - b. Promosi dan pemasaran pariwisata belum dikelola secara maksimal.
2. Lama tinggal wisatawan masih terbatas, hal ini dipengaruhi oleh:
 - a. Ketersediaan fasilitas pendukung pada setiap obyek dan daya tarik wisata belum memadai sehingga secara bertahap harus terus dibenahi/dilengkapi agar mampu menarik wisatawan untuk beraktivitas lebih banyak, mengisi waktu kunjungan dengan aneka aktivitas wisata yang unik, menarik, berguna/bermanfaat baik secara ekonomi, sosial dan budaya.
 - b. Desa Wisata belum dikelola secara maksimal baik dari sisi kelembagaan serta manajemen.
 - c. Produk ekonomi kreatif sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan masih sedikit dan belum memiliki daya saing serta nilai jual yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif masih terbatas.
 - d. Para pelaku usaha pariwisata yang handal di bidangnya masih tergolong rendah dan banyak yang belum memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. VISI DAN MISI KEMENTRIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

3.2.1 Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah **"Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan serta pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang sesuai perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, mengedepankan kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif. Tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's).

3.2.2 Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi ke 2 Presiden Republik Indonesia, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1

RENSTRA Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Misi : Memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif			
Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional	SS1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Arah Kebijakan 1: Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing	Strategi Arah Kebijakan 1: - Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif. - Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan Prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. - Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi. Strategi
	SS2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional		
	SS3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan		
	SS4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Arah Kebijakan 2: Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (Strategic Partnership)	Arah Kebijakan 2: - Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial. - Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. - Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing. - Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
	SS5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan		
	SS6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	Arah Kebijakan 3: Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi	Strategi Arah Kebijakan 3: - Mengembangkan industry pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekraf). - Meningkatkan tata Kelola pariwisata dan ekraf nasional. - Mendorong peningkatan investasi, pendanaan dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekraf.
	SS7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif		
	SS8. Teselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	Arah Kebijakan 4: Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing	Strategi Arah Kebijakan 4: - Optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekraf. - Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekraf. - Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekraf. Strategi

<p>SS9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>SS10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif</p> <p>SS11. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional</p>	<p>Arah Kebijakan 5:</p> <p>Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan</p>	<p>Arah Kebijakan 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual. - Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekraf berbasis budaya dan IPTEK. <p>Strategi</p>
	<p>Arah Kebijakan 6:</p> <p>Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas</p>	<p>Arah Kebijakan 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing. - Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien. - Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.
	<p>Arah Kebijakan 7:</p> <p>Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional</p>	<p>Strategi Arah Kebijakan 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/ Baparekraf

3.3.
TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD PROVINSI NTT
TAHUN 2005-2025

3.3.1
VISI

Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut: **“Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Tiga konsep dasar visi pembangunan bermakna bahwa keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus

bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa.

3.3.2 MISI

Misi Pembangunan merupakan Upaya nyata untuk mewujudkan visi Pembangunan. Misi Pembangunan Provinsi NTT sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
- 2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global
- 3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum,
- 4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan
- 5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan,
- 6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan Masyarakat
- 7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim

3.4. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2024-2026

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dapat dilihat dalam sajian tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial				
Sasaran RPD	Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung perekonomian				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas promosi daya tarik wisata dan kualitas SDM pariwisata serta ekonomi	Meningkatnya kuantitas promosi pariwisata (jumlah kegiatan promosi)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

	kreatif				
		Meningkatnya jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis digital (jumlah produk)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (orang bersertifikat)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat)	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW)	- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI (jumlah fasilitasi HKI)	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

3.5. VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJPD
KABUPATEN ENDE TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024-2026 adalah pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025, yakni: **“Terwujudnya Masyarakat Ende Yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia “**.

Berdasarkan visi tersebut, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ende, yakni :

1. Mewujudkan masyarakat Ende yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan masyarakat Ende yang mandiri, maju, berkualitas dan berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat Ende yang demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Ende sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosialbudaya, politik dan keamanan
5. Mewujudkan Ende sebagai kabupaten yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
6. Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)

7. Menciptakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang kokoh.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 pada periode RPJM tahun ke tiga ini, maka titik berat pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Ende sebagai wilayah keseimbangan lingkungan (ekosistem), untuk itu diperlukan:

1. Upaya rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan-lahan kritis;
2. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam;
3. Merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan;
4. Sumberdaya air dan DAS;
5. Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik.

Disamping itu perhatian tetap diarahkan pada peningkatan ekonomi rakyat, melalui:

1. Pola pengembangan wilayah terpadu;
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan kesehatan untuk seluruh wilayah Kabupaten Ende. Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan komitmen yang tinggi dari setiap pelaku pembangunan dengan tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek Pembangunan

3.6. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN ENDE 2025-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahun		
								2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	1	Menyelenggarakan Proses Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau, dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan.	1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan terutama untuk memastikan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	✓	✓	✓
						2	Meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik	✓	✓	✓
						3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	✓	✓	✓
						4	Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan Guru dan tenaga kependidikan	✓	✓	✓
						5	Meningkatkan Peran Pengawas, Gugus, MGMP, MKKS, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan	✓	✓	✓
						6	Meningkatkan kemampuan literasi serta minat baca Masyarakat	✓	✓	✓
						7	Menumbuhkembangkan generasi muda berprestasi	✓	✓	✓
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.	Meningkatkan Upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitasi Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga	8	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terutama untuk memastikan terpenuhinya SPM bidang Kesehatan	✓	✓	✓
						9	Mempercepat Penanganan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat	✓	✓	✓
						10	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi	✓	✓	✓
						11	Mendorong pembudayaan Germas dan penguatan program keluarga sehat	✓	✓	✓
						12	Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	✓	✓	✓
						13	Mendorong pengembangan lingkungan sehat	✓	✓	✓
3.	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	3.	Mengembangkan Pariwisata melalui Pemenuhan Unsur 5 A pariwisata (Attraction, Actifity, Accesibility, Accommodation, dan Amenities) dan Penguatan Kelembagaan dan Promosi	14	Pengembangan Destinasi Wisata terpadu yang meliputi Penataan Destinasi, Pengembangan Amenitas, Penyediaan Akomodasi dan Produk Wisata serta Kelembagaan dan Promosi berbasis IT	✓	✓	✓
						15	Peningkatan Akses Transportasi dan Komunikasi Destinasi Wisata	✓	✓	✓
		4	Meningkatnya Daya Saing	4	Pengembangan Ekonomi Sektor Unggulan	16	Pengembangan Koperasi dan Sentra Usaha/Industri Mikro Kecil Menengah	✓	✓	✓

			Sektor Unggulan (Industri Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan)		dan Sektor Potensial	17	Pengembangan Pasar dan Perlindungan Konsumen	✓	✓	✓
		5.	Meningkatnya Investasi	5.	Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang cepat, tepat dan transparan	18	Penyediaan Sistem Informasi Investasi berbasis Teknologi Informas	✓	✓	✓
						19	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perijinan melalui integrasi proses perijinan terpadu	✓	✓	✓
		6	Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan	6	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Perikanan, dan Penyediaan Pangan berkualitas Bagi Masyarakat	20	Mengembangkan Inovasi untuk peningkatan produksi dan nilai tambah hasil Pertanian dan Perikanan berbasis pada karakteristik lokal masing-masing wilayah	✓	✓	✓
						21	Revitalisasi dan Perluasan Lahan Pertanian	✓	✓	✓
						22	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan	✓	✓	✓
						23	Revitalisasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kelompok Tani dan Nelayan	✓	✓	✓
						24	Penyediaan Informasi Harga Komoditas	✓	✓	✓
						25	Mengurangi Stunting melalui desa B2SA	✓	✓	✓
						26	Pemenuhan Ketercukupan Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi Masyarakat	✓	✓	✓
		7	Menurunkan Tingkat Pengangguran	7	Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	27	Peningkatan Kualitas Pekerja dan Calon Pekerja melalui Pelatihan Manajemen dan Ketrampilan Berusaha	✓	✓	✓
						28	Dukungan Penyediaan Peralatan dan Modal bagi Wirausaha baru Terseleksi	✓	✓	✓
		8	Menurunkan Angka Kemiskinan	8	Mengurangi beban pengeluaran dan melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan	29	Pemenuhan kebutuhan pokok melalui pemberian bantuan dan subsidi	✓	✓	✓
						30	Pengembangan sistem jaminan sosial	✓	✓	✓
						31	Pengembangan budaya usaha	✓	✓	✓
		9	Meningkatnya Pengendalian Inflasi	9	Menjamin keterseediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok	32	Penguatan Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah	✓	✓	✓
						33	Penguatan Koordinasi dengan TPID Provinsi dan Kabupaten Sekitarnya, BUM/D dan Dunia Usaha untuk memastikan rantai pasokan kebutuhan barang masyarakat	✓	✓	✓
4.	Meningkatnya kualitas	10	Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur	10	Meningkatkan aksesibilitas wilayah	34	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat	✓	✓	✓

	ketersediaan infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan pembangunan kawasan perdesaan		Dasar, Sosial dan Ekonomi yang Ramah Lingkungan			35	Pemenuhan Akses Perumahan terutama bagi Masyarakat Miskin / Berpenghasilan Rendah	✓	✓	✓				
						36	Peningkatan akses listrik untuk masyarakat	✓	✓	✓				
						37	Meningkatkan kondisi Kemantapan Jalan untuk mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	✓	✓	✓				
						38	Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi	✓	✓	✓				
		11	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaaan	11	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.	39	Meningkatkan pembangunan Desa berbasis potensi unggulan	✓	✓	✓				
						40	Penguatan Koordinasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan kawasan perdesaan	✓	✓	✓				
						41	Peningkatan kapasitas Aparatur serta revitalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa	✓	✓	✓				
		12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12	Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	42	Meningkatkan kualitas air	✓	✓	✓				
						43	Meningkatkan kualitas udara	✓	✓	✓				
						44	Meningkatkan kualitas lahan	✓	✓	✓				
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)	13	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	13	Optimalisasi penerapan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan daerah	45	Peningkatkan kapasitas kelembagaan SDM birokrasi pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan/pengendalian dan evaluasi pembangunan	✓	✓	✓				
						46	Optimalisasi penerapan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan public	✓	✓	✓				
						47	Peningkatan sinergitas prioritas pembangunan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	✓	✓	✓				
				14	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan Swasta/Dunia Usaha dalam pembangunan	14	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan Swasta/Dunia Usaha dalam pembangunan	48	Peningkatan kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan swasta/ Dunia Usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	✓	✓	✓		
		15	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan Swasta/Dunia Usaha dalam pembangunan					15	Peningkatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	49	Pemenuhan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat (SPM Sosial)	✓	✓	✓
										50	Peningkatan Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyerakat (SPM Trantibum dan Linmas)	✓	✓	✓
		51	Perkuatan Koordinasi Penanganan Urusan Pengarusutamaan Gender dan Upaya Perlindungan Anak	✓	✓	✓								

		usaha dan kehidupan serta perlindungan sosial bagi masyarakat		52	Menjamin pelaksanaan hak-hak politik masyarakat serta Penguatan fungsi lembaga demokrasi	✓	✓	✓
--	--	---	--	----	--	---	---	---

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Program Pembangunan Daerah 2025-2026 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim
3. Program Pengendalian Inflasi
4. Program Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi
6. Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum

3.7. KETERKAITAN VISI DAN MISI KEMENPAREKRAF, DINAS PARIWISATA PROVINSI NTT, RPD KABUPATEN ENDE 2025-2026, DAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, perlu memperhatikan keterkaitan antara Kebijakan Nasional Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi NTT, dan Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Berdasarkan program pembangunan daerah Kabupaten Ende 2025-2026, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan bidang pariwisata mendukung pencapaian program pembangunan daerah kedua yakni **“Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim”**. Hal ini juga sejalan dengan Tujuan Dinas Pariwisata Provinsi NTT yakni **“Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif”**. Untuk skala nasional, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende juga turut serta mendukung pencapaian tujuan Kemenparekraf RI **“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”**.

Pariwisata dapat menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya pengembangan pariwisata, masyarakat lokal pada akhirnya diberdayakan karena mereka yang akan bertemu wisatawan di lapangan dan berperan besar dalam memberikan pengalaman yang berkesan dan impresif kepada wisatawan, juga bertindak sebagai pencipta nilai dan kolaborator dalam mempromosikan kampung halamannya sebagai tujuan wisata. Pengembangan pariwisata akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi obyek wisata. Selain itu pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah melibatkan keikutsertaan masyarakat lokal. Dengan pengetahuan yang sudah dimiliki masyarakat akan berusaha mengembangkan UKM yang telah mereka jalani ataupun bagi mereka yang belum memiliki usaha dapat termotivasi merintis bisnis pariwisata.

Tabel 3.4
Keterkaitan Visi dan Misi Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi NTT, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende 2025-2026 dan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Kebijakan Kemenparekraf RI Tahun 2020-2024	Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi NTT	RPD Kabupaten Ende 2025-2026	RENSTRA DINAS PARIWISITA KAB. ENDE Tahun 2025-2026
Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi	Mewujudkan pertumbuhan	Meningkatnya kualitas Perekonomian	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap

Kreatif terhadap ketahanan nasional	terhadap ekonomi	ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	kabupaten Ende	PDRB
-------------------------------------	------------------	--	----------------	------

3.8. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende telah dilakukan berbasis spasial atau keruangan yang dilakukan dengan menyusun perencanaan sesuai dokumen spasial yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.

Ditinjau dari karakteristik wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2011 maka Kabupaten Ende dibagi dalam 5 (lima) wilayah pengembangan yakni:

1. Wilayah Pengembangan I (meliputi Kecamatan Ende Tengah dan 3 kecamatan dalam Kota) dengan fokus pengembangan pada Situs Bung Karno, Wisata Sejarah, Kuliner dan wisata bahari).
2. Wilayah Pengembangan II (meliputi kecamatan Detusoko, Detukeli, Ndona Timur dan Ndona) dengan fokus pengembangan wisata alam (air panas, sawah bertingkat, wisata sejarah dan wisata budaya (kampung tradisional).
3. Wilayah Pengembangan III (Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur dan Ndori) dengan fokus pada wisata alam (Taman Nasional Kelimutu), Perkampungan adat, Kerajinan tenun, pengembangan desa wisata dan agrowisata.
4. Wilayah Pengembangan IV (meliputi kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro) dengan dominasi pengembangan wisata alam (batu hijau dan danau Tiwu Lewu), bahari , sejarah (benteng Portugis).
5. Wilayah Pengembangan V (meliputi kecamatan Maurole, Wewaria, Kotabaru dan Lepembusu Kelisoke) dengan fokus pada pengembangan wisata alam (danau Bowu dan Tiwusora) dan wisata bahari.

Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Ende yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, yang menetapkan 5 Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ende yaitu :

1. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Ende-Kelimutu dan sekitarnya
2. Kawasan Pengembangan Pariwisata Maurole, Detukeli dan Wewaria
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kotabaru dan Lepembusu Kelisoke
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata Lio Timur dan Ndori

5. Kawasan Pengembangan Pariwisata Ende, Pulau Ende, Nangapanda dan Maukaro.

Dengan menetapkan zonasi pengembangan pariwisata diharapkan akan terbangun model-model pembangunan pariwisata yang berakarakteristik dan berbasis pada esensi kelokalan/kedaerahan. Dengan demikian akan menjamin suatu proses pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Ende masih terfokus pada beberapa kawasan yang secara nyata memiliki keunggulan sumber daya wisata baik dari sisi ketersediaan atraksi, aksesibilitas, dan amenities. Dimana daya tarik wisata yang ditawarkan merupakan jenis wisata alam dan budaya yang berkembang dan terlestarikan secara alami. Dengan demikian berbagai aspek yang terkait dengan penataan obyek dan daya tarik wisata harus memperhatikan keseimbangan baik yang menyangkut tata ruang wilayah dan keberlanjutannya.

3.9. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis sektor pariwisata yang merupakan bagian tugas untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainable) di sektor bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk standar keamanan dan Kesehatan.
2. Pascapandemi Covid-19 tumbuh 4 (empat) tren pariwisata yakni Bleisure, Wellness Experience, Deep and Meaningful, dan Set-Jetting. Bleisure (bisnis and leisure) adalah tren yang tumbuh pasca pandemic dimana kembali pulihnya perjalanan bisnis secara global dan tumbuhnya kebebasan untuk bekerja jarak jauh meningkatkan fleksibilitas untuk berwisata di sela rutinitas pekerjaan, pelaku perjalanan bisnis terus menginkorporasi aktivitas leisure dalam komitmen

pekerjaannya. Tren pariwisata *Wellness Experience* atau tren pariwisata kebugaran. Pascapandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran perilaku wisatawan yang semakin menyadari kesehatan jiwa dan pengalaman spiritual. Tren pariwisata ketiga yaitu *Deep and Meaningfull* atau pengalaman berwisata yang bermakna. Tren ini masih dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19. Para wisatawan menginginkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan bermakna. Keindahan alam dan budaya yang kental memberi peluang yang besar bagi Indonesia dalam mengembangkan *storynomics tourism* yang membantu membangun interpretasi dan imajinasi wisatawan pada sebuah obyek wisata. Tren pariwisata selanjutnya adalah *Set-Jetting* memberikan rasa bangga saat Berlibur.

3. Pariwisata keberlanjutan (*sustainable tourism*) dianggap sebagai sebuah mesin untuk terus membangun model pariwisata yang lebih bertanggung jawab, tanpa membahayakan pengalaman atau kualitas pengalaman wisatawan. Sektor ini memainkan peran penting, tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam meningkatkan kemajuan sosial dan melestarikan bumi.
4. Teknologi pembayaran yang menggunakan alat pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*). Penyesuaian tren teknologi ini sekaligus sebagai alat dorong ekonomi kreatif. Pembayaran dengan uang digital ini membuat wisatawan nyaman dan tidak khawatir terpapar Covid-19 karena tidak melakukan interaksi fisik dengan orang secara tidak langsung.
5. Pelaksanaan regulasi terbaru terkait retribusi daerah untuk obyek wisata.

3.10. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, di mana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Adapun isu strategis pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Ende adalah “Sinergitas pembangunan Pariwisata belum optimal.” Kondisi ini (kurang sinergitas) terjadi dalam

berbagai level seperti sinergitas antar OPD yang menangani pembangunan seperti infrastruktur (jalan dan jembatan), listrik, jaringan air, komoditas pertanian, juga sinergitas antar bidang dalam institusi dinas (bidang Promosi, Destinasi, Industri dan Kelembagaan), maupun sinergitas antar wilayah (dengan desa/kecamatan terutama dalam menentukan prioritas pembangunan yang berbasis pariwisata di desa/kelurahan atau kecamatan).

Tabel 3.5

MATRIK ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)

<div>Analisis Lingkungan Internal (IFAS)</div> <div>Analisis Lingkungan Eksternal (EFAS)</div>	KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weakneses))
	<div>1. Mempunyai posisi wilayah/daerah yang strategis karena berada ditengah pulau Flores</div> <div>2. Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia</div> <div>3. Mempunyai nilai budaya yang tinggi dengan keberadaan Kampung Adat, dan Rumah Adat sebagai pusat kebudayaan lokal.</div> <div>4. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Ende yang masih kental dan mengakar.</div> <div>5. Keramah tamahan dari masyarakat Kabupaten Ende terhadap wisatawan</div> <div>6. Mempunyai keberagaman potensi wisata, mulai dari pegunungan,hutan, lembah, ngarai, pedesaan, perkotaan, pantai, danau dan sungai.</div> <div>7. Harga yang sangat bersaing dengan destinasi wisata yang lain</div> <div>8. Keamanan dan kenyamanan terjaga/ kondusif.</div> <div>9. Memiliki potensi alam dan budaya untuk kepentingan penelitian maupun ilmu pengetahuan.</div>	<div>1. Stagnasi pengembangan produk wisata</div> <div>2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan</div> <div>3. Terbatasnya frekuensi penerbangan dari daerah lain ke Ende.</div> <div>4. Rendahnya kualitas dan sistem pelayanan transportasi publik</div> <div>5. Rendahnya kualitas jaringan aksesibilitas dari titik simpul distribusi (kota) menuju lokasi daya tarik wisata.</div> <div>6. Rendahnya kualitas sarana, prasarana dan fasilitas penunjang pariwisata (hotel-hotel, fasilitas makan minum, fasilitas layanan informasi pariwisata.</div> <div>7. Rendahnya kualitas fasilitas umum pendukung pariwisata (toilet, pedestrian, dan sebagainya).</div> <div>8. Belum adanya pencitraan yang kuat yang mampu membuat/memposisikan destinasi secara lebih kompetitif di lingkungan regional maupun nasional.</div> <div>9. Rendahnya lama tinggal (<i>Length of Stay</i>) yang berdampak pada rendahnya Pembelanjaan (<i>Spending</i>) wisatawan</div> <div>10. Belum optimalnya pengetahuan, komitmen dan partisipasi masyarakat mengenai Sadar Wisata dan Sapta Pesona.</div>
PELUANG (opportunities)		Strategi S - O
<div>1. Tren yang tumbuh pasca pandemi yaitu bleisure (bisnis and leisure), Wellness Experience (pengalaman wisata kebugaran), Deep and Meaningful (pengalaman wisata yang bermakna), dan Set-Jetting (memberikan rasa bangga saat belibur)</div> <div>2. Perkembangan IPTEK dan Telekomunikasi.</div>		<div>1. Pengembangan wisata minat khusus, khususnya yang menawarkan suasana pedesaan dan budaya (paket desa wisata dll)</div> <div>2. Pengembangan wisata berbasis festival budaya dan tradisi secara rutin</div> <div>3. Pengembangan wisata pendidikan dan penelitian yang</div>
		Strategi W - O
		<div>1. Pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan di bidang kepariwisataan</div> <div>2. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas cinderamata dan makanan tradisional</div> <div>3. Penambahan dan pengembangan jalur</div>

<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya trend <i>ecotourism</i> dan minat khusus lainnya 4. Peningkatan trend kunjungan wisatawan ke Ende. 5. Pertumbuhan infrastruktur yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata 6. Ditetapkannya NTT sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia 7. Penetapan Flores sebagai salah satu DTW unggulan 8. Ditetapkannya Ende -Kelimutu dan sekitarnya sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 9. Ditetapkannya Komodo Destinasi Super Prioritas (DSP) 10. Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 11. Kabupaten Ende sebagai jalur wisata layar internasional 	<ul style="list-style-type: none"> menarik 4. Pengembangan wisata sejarah (napak tilas dll) 5. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang kepariwisataan beserta manfaatnya 	<ul style="list-style-type: none"> penerbangan dan seat capacity ke Ende 4. Pemfokusan pada pasar wisatawan minat khusus (heritage, culture dan village tourism) 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana transportasi wisata dari dan menuju kawasan wisata 6. Pengembangan fasilitas akomodasi berbasis wisata desa/village tourism 7. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta 8. Pengembangan branding yang sesuai dengan potensi Kabupaten Ende dan persepsi pasar 9. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM Pariwisata mengenai Sadar Wisata dan Sapta Pesona
ANCAMAN (<i>Threats</i>)	Strategi S – T	Strategi W – T
<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Kabupaten Ende yang berada di sabuk gunung berapi (Ring of Fire) yakni Ia dan Kelimutu 2. Persaingan dengan obyek wisata sejenis yang berdekatan di Flores dan NTT 3. Kerawanan terhadap bencana alam seperti cuaca ekstrim, gempa bumi dan vulkanik 4. Ketatnya persaingan dengan destinasi lain 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan daya tarik wisata yang berkarakteristik Ende 2. Pengembangan pariwisata tanggap bencana 3. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang tanggap bencana 4. Peningkatan pemeliharaan dan revitalisasi potensi wisata heritage 5. Revitalisasi dan pemeliharaan benda-benda sejarah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan “early warning system” untuk bencana alam 2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana penunjang wisata 3. Pengembangan kerajinan souvenir khas Kabupaten Ende 4. Pengembangan paket wisata alam, sejarah dan wisata pedesaan 5. Pengembangan pedoman pembangunan sarana pariwisata yang menonjolkan kekhasan alam dan budaya Ende 6. Pengembangan Branding Pariwisata Kabupaten Ende yang berbasis pada alam, sejarah dan budaya, adat istiadat serta keramahan masyarakat Ende

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Ende 2025-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende 2024-2026.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja Pembangunan. Sasaran yang ditetapkan akan menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Dinas Pariwisata Ende Tahun 2025-2026. Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang akan dicapai adalah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB. Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende periode 2025-2026 terdiri atas 3 (tiga) sasaran yakni:

- 1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
- 2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 beserta indikator kinerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Target Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026
1	Kontribusi Sektor		Prosentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,28%	2 %	3 %	5 %
1.1	Pariwisata Terhadap	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Prosentase jumlah kenaikan kunjungan wisata	101.875 orang	0,07%	0,14 %	0,18 %
1.2	PDRB	Meningkatnya lama tinggal wisatawan (Lama Menginap)	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,4 hari	1,5 hari	1,6 hari	1,7 hari
1.3		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Pariwisata	B	B	B	B

4.2

HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026
DAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

Tabel 4.2

Hubungan Tujuan, Sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan
Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Tujuan	Indikator Kinerja (Strategis)	Sasaran	Indikator Kinerja (Strategis)	Kinerja Awal Tahun 2022	Target					
					2024	2025	2026	Kinerja Akhir		
RPD Kabupaten Ende										
Meningkatnya kualitas Perekonomian kabupaten Ende	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	0,3126	0,3150	0,3166	0,3181	
RENSTRA Dinas Pariwisata Kab Ende										
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Prosentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB					0,28%	2 %	3 %	5 %	5%
	Prosentase jumlah kenaikan kunjungan wisata	1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	1	Prosentase jumlah kenaikan kunjungan wisata	101.875 orang	0,07%	0,14%	0,14%	0,18%
		2	Meningkatnya lama tinggal wisatawan (Lama Menginap)	1	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,4 hari	1,5 hari	1,6 hari	1,7 hari	1,7 hari
		3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP Dinas Pariwisata	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah Langkah-langkah yang berisikan program prioritas Pembangunan untuk pencapaian sasaran. Dalam pelaksanaan strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Sedangkan arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Tahun 2025-2026 selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	1. Meningkatkan promosi pariwisata	1. Promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event, informasi pariwisata digital, website, konten video, audio dan visual pariwisata alam, budaya dan histori. 2. Penyebarluasan data informasi melalui media TIC, media elektronik, media sosial, internet 3. Peningkatan citra kawasan melalui integrated branding secara berkelanjutan
	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan (Length Of Stay)	1. Mengembangkan Pariwisata melalui Pemenuhan Unsur 5 A pariwisata (Attraction, Activity, Accesibility, Accomodation, dan Amenities) 2. Mengembangkan potensi kearifan lokal, budaya dan alam sebagai ekowisata 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekonomi kreatif berbasis HKI 4. Meningkatkan kualitas lingkungan dan fasilitas pendukung serta akses interdestinasi 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata	1. Peningkatan kualitas dan Pengembangan keanekaragaman daya tarik wisata 2. Pengembangan aksesibilitas dan amenitas pariwisata 3. Sertifikasi usaha jasa pariwisata 4. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan dan sasaran dapat diwujudkan melalui penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan beserta masing-masing indikatornya. Dinas Pariwisata Kabupaten Ende melaksanakan 5 (lima) Program dan 16 (enam belas) kegiatan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2024-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Rencana Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

- 1. Program Pemasaran Pariwisata
 - a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 2. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Ende selama Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Formula		Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD				
								Nilai	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3. Meningkatnya kualitas Perekonomian kabupaten Ende											5.090.000.000		6.742.550.947		6.924.254.344		18.756.805.291			
				3.1 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)							5.240.000.000		5.167.550.947		5.274.254.344		15.681.805.291			
3	26			PARIWISATA							3.990.000.000		5.167.550.947		5.274.254.344		14.431.805.291			
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100$		100	%	100	2.740.000.000	100	3.367.550.947	100	3.374.254.344	100	9.491.805.291	Dinas Pariwisata
3	26	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Penanggagaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penanggagaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata Tahun N + Jumlah dokumen Perencanaan dan Penanggagaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata Tahun N-1		25	Dokumen	31	40.000.000	37	88.000.000	43	88.000.000	43	88.000.000	
3	26	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun N+Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun N-1		9	Dokumen	11	10.000.000	13	28.000.000	15	28.000.000	15	28.000.000	
3	26	1	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun N + Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun N -1		4	Dokumen	5	15.000.000	6	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	
3	26	1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun N + Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun N		8	Laporan	10	5.000.000	12	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	26	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun N + Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun N-1	4	Laporan	5	10.000.000	6	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	Dinas Pariwisata	
3	26	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun N + Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun N-1	83	Dokumen	198	2.345.000.000	295	2.680.050.947	392	2.680.554.344	320	2.680.554.344		
3	26	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tahun N + Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tahun N-1	27	Orang/Bulan	54	2.300.000.000	81	2.600.050.947	108	2.600.054.344	108	2.600.054.344		
3	26	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun N + jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun N-1	60	Dokumen	120	30.000.000	180	35.000.000	240	35.000.000	240	35.000.000		
3	26	1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun N + Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun N-1	4	Laporan	5	5.000.000	6	15.000.000	7	15.500.000	7	15.500.000		
3	26	1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun N + Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun N-1	18	Laporan	36	5.000.000	54	15.000.000	72	15.000.000	72	15.000.000		

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Nilai	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	1	02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun N + Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun N-1	18	Laporan	36	5.000.000	54	15.000.000	72	15.000.000	72	15.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	1	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun N +Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun N-1	5	Laporan	7	25.000.000	9	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	
3	26	1	03	0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Tahun N + Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Tahun N-1	1	Laporan	2	15.000.000	3	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
3	26	1	03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tahun N + Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tahun N-1	4	Laporan	5	10.000.000	6	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	
3	26	1	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun N + Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun N-1	0	Kegiatan	1	45.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
3	26	1	05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun N + Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun N-1	0	Orang	1	45.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
										Nilai	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun N + Jumlah Administrtasi Umum Perangkat Daerah Tahun N-1	16	Paket	33	135.000.000	50	235.000.000	67	235.000.000	23	235.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tahun N + Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tahun N-1	1	Paket	2	10.000.000	3	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	
3	26	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tahun N + Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tahun N-1	1	Paket	2	35.000.000	3	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	
3	26	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tahun N + jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tahun N-1	1	Paket	2	25.000.000	3	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
3	26	1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tahun N + Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tahun N-1	0	Dokumen	1	5.000.000	2	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
3	26	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun N + Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun N-1	1	Laporan	2	25.000.000	3	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	
3	26	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun N+ Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun N-1	12	Laporan	24	35.000.000	36	60.000.000	48	60.000.000	4	60.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun N-1	10	Unit	12	52.000.000	14	95.000.000	16	95.000.000	16	95.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	1	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Tahun N-1	8	Unit	9	40.000.000	10	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	
3	26	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tahun N + Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tahun N-1	2	Unit	3	12.000.000	4	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	
3	26	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun N + Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun N-1	36	Laporan	72	58.000.000	108	84.500.000	144	87.000.000	144	87.000.000	
3	26	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun N + Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun N-1	12	Laporan	24	1.000.000	36	4.500.000	48	5.000.000	48	5.000.000	
3	26	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tahun N + Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tahun N-1	12	Laporan	24	30.000.000	36	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	
3	26	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tahun N + Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tahun N-1	12	Laporan	24	27.000.000	36	30.000.000	48	32.000.000	48	32.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	26	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun N - Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun N-1	8	Unit	16	40.000.000	24	50.000.000	32	53.700.000	32	53.700.000	Dinas Pariwisata	
3	26	1	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tahun N - 1	8	Unit	16	40.000.000	24	50.000.000	32	53.700.000	32	53.700.000		
3	26	1			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2	Persentase Daya Tarik Destinasi wisata yang memenuhi standar 5A	$\frac{\text{Jumlah Daya Tarik Wisata yang memenuhi standar 5A}}{\text{Jumlah Daya Tarik Wisata Keseluruhan}} \times 100$	68,75	%	81,25	800.000.000	87,50	1.125.000.000	100	1.150.000.000	100		3.075.000.000
					Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan DTW Tahun N + Jumlah Pengelolaan DTW Tahun N-1	11	Lokasi	13 Lokasi	154.000.000	14 Lokasi	390.000.000	16 Lokasi	370.000.000	16 Lokasi	914.000.000		
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkenbang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan yang dikembangkan Tahun N + Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan yang dikembangkan Tahun N-1	11	Lokasi	13 Lokasi	114.000.000	14 Lokasi	350.000.000	16 Lokasi	300.000.000	16 Lokasi	764.000.000		
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Tahun N + Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Tahun N-1	0	Lokasi	11 Lokasi	5.000.000	13 Lokasi	2.000.000	16 Lokasi	10000000,0	16	17.000.000		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Nilai	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Tahun N + Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Tahun N-1	0	Laporan	11 Laporan	5.000.000	13 Laporan	5.000.000	16 Laporan	20000000,0	16 Laporan	30.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Tahun N + Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Tahun N-1	0	Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	40000000,0	1 Dokumen	103.000.000	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata Tahun N + Jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata Tahun N-1	0	Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	350.000.000	
3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun N + Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun N-1	0	Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	350.000.000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Ditetapkan Tahun N + Jumlah Destinasi Pariwisata yang Ditetapkan Tahun N-1	0	Lokasi	0 Lokasi	636.000.000	1 Lokasi	515.000.000	1 Lokasi	610.000.000	1 Lokasi	1.761.000.000	
3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Tahun N + Jumlah Destinasi Pariwisata Tahun N-1	0	Lokasi	1 Lokasi	5.000.000	2 Lokasi	10.000.000	3 Lokasi	15.000.000	3 Lokasi	30.000.000	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Nilai	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	02	2.03	0002		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata Tahun N + Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata Tahun N-1	0	Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	115.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan Tahun N + jumlah Sdestinasi pariwisata yang dikembangkan Tahun N-1	0	Lokasi	1	50.000.000	2 Lokasi	60.000.000	3 Lokasi	100.000.000	3 Lokasi	210.000.000	
3	26	02	2.03	0004		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Tahun N + Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Tahun N-1	0	Unit	1	550.000.000	2 Unit	400.000.000	3 Unit	445.000.000	3 Unit	1.395.000.000	
3	26	02	2.03	0010		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tahun N + jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun N-1	0	Laporan	1	1.000.000	2 Laporan	5.000.000	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	11.000.000	
3	26	02	2.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen TDUP	Jumlah Dokumen TDUP yang dimiliki Usaha Pariwisata Tahun N + Jumlah Dokumen TDUP yang dimiliki Usaha Pariwisata Tahun N-1	1	Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	50.000.000	
3	26	02	2.04	0007		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diperluas	Jumlah usaha yang dibina dan diperluas Tahun N + jumlah usaha yang dibina dan diperluas diawasi Tahun N-1	0	Usaha	3	5.000.000	6 Usaha	10.000.000	10 Usaha	10.000.000	10 Usaha	25.000.000	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Nilai	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Tahun N + jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Tahun N-1	0	Dokumen	3	5.000.000	6 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	25.000.000	Dinas Pariwisata	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1 Persentase Pemasaran Pariwisata Optimal	Jumlah Pemasaran Pariwisata yang ditindaklanjuti Tahun n / Jumlah Pemasaran Pariwisata yang direncanakan Tahun n x 100	61,54	%	69,23	150.000.000	76,92	225.000.000	100%	250.000.000	100	625.000.000		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah Pemasaran Pariwisata yang ditindaklanjuti Tahun n + Jumlah Pemasaran Pariwisata yang ditindaklanjuti Tahun n-1	8	Kegiatan	9 Kegiatan	150.000.000	10 Kegiatan	225.000.000	13 Kegiatan	250.000.000	13 Kegiatan	625.000.000		
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Tahun N + Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Tahun N-1	4	Dokumen	8 Dokumen	12.500.000	12 Dokumen	25.000.000	16 Dokumen	30.000.000	16 Dokumen	67.500.000		
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Tahun N + Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Tahun N-1	2	Dokumen	5 Dokumen	12.500.000	8 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	67.500.000		
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun N + 1 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun N - 1	0	Dokumen	3	12.500.000	6 Dokumen	25.000.000	9 Dokumen	30.000.000	9 Dokumen	67.500.000		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan/Event Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan Tahun N + Jumlah Kegiatan/Event Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan Tahun N -1	4	Kegiatan	5 Kegiatan	100.000.000	10 Kegiatan	125.000.000	15 Kegiatan	130.000.000	15 Kegiatan	355.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun N +1 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun N - 1	4	Promosi	5 Promosi	12.500.000	10 Promosi	25.000.000	15 Promosi	30.000.000	15 Promosi	67.500.000	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1 Persentase Sub Sektor Ekraf yang memanfaatkan yang telah memiliki HKI	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang memanfaatkan produk yang telah memiliki HKI Total Sub Sektor Ekraf x 100	5,88%	%	33,33%	150.000.000	66,67%	225.000.000	100%	250.000.000	17 sub sektor	625.000.000	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang memanfaatkan produk yang telah memiliki HKI	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang memanfaatkan produk yang telah memiliki HKI Tahun N Total Sub Sektor Ekraf x 100	1	sub sektor	6 sub sektor	150.000.000	12 sub sektor	225.000.000	17 sub sektor	250.000.000	17 sub sektor	625.000.000	
3	26	04	2.02	014	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan/orang yang mendapatkan fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	0	Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	175.000.000	3 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	475.000.000	
3	26	04	2.02	020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah laporan/hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1	Laporan	2 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	150.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
								Nilai	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah SDM yang Dikembangkan Tahun N}}{\text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun N-1}} \times 100$	44,21%	%	31,11%	150.000.000	36,18%	225.000.000	41,25%	250.000.000	41,25%	625.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun N}}{\text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun N-1}} \times 100$	0	orang	30 orang	75.000.000	100 orang	135.000.000	145 orang	155.000.000	145 orang	405.000.000	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang difasilitasi pengembangan kompetensinya Tahun n	0	orang	15 orang	20.000.000	50 orang	25.000.000	60 orang	30.000.000	125 orang	75.000.000	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan untuk pengembangan pariwisata tahun n	0	orang	15 orang	20.000.000	50 orang	25.000.000	60 orang	30.000.000	125 orang	75.000.000	
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	orang	6 Laporan	75.000.000	9 Laporan	85.000.000	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	255.000.000	
3	26	05			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan tahun n	457	orang	497 orang	75.000.000	527 orang	112.500.000	557 orang	125.000.000	557 orang	312.500.000	
					Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekenomi Kreatif		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekraf	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekraf tahun n	457	orang	497	35.000.000	527	90.000.000	557	95.000.000	557 orang	95.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende yang akan dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025 – 2026 disajikan dalam tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

No	Bidang Urusan/ Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Tahun Awal 2023	Tahun			Kondisi Kinerja pada Masa Akhir RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	101.875	0,07%	0,14%	0,16%	0,16%
2	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan (Length Of Stay)	1,48 hari	1,5 hari	1,6 hari	1,7 hari	1,7 hari
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, 2023

BAB VIII

PENUTUP


8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 adalah selama dua tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPPARDA Kabupaten Ende Tahun 2014-2034, RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan kementerian.
2. Program indikatif Tahun 2025-2026 ditetapkan pada 5 (lima) program pembangunan pariwisata yang wajib dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan dalam program indikatif.
3. Sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ende diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende bersama Sekretaris Dinas, dan para Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Rencana Strategis akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PJ. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU